

DAFTAR PUSTAKA

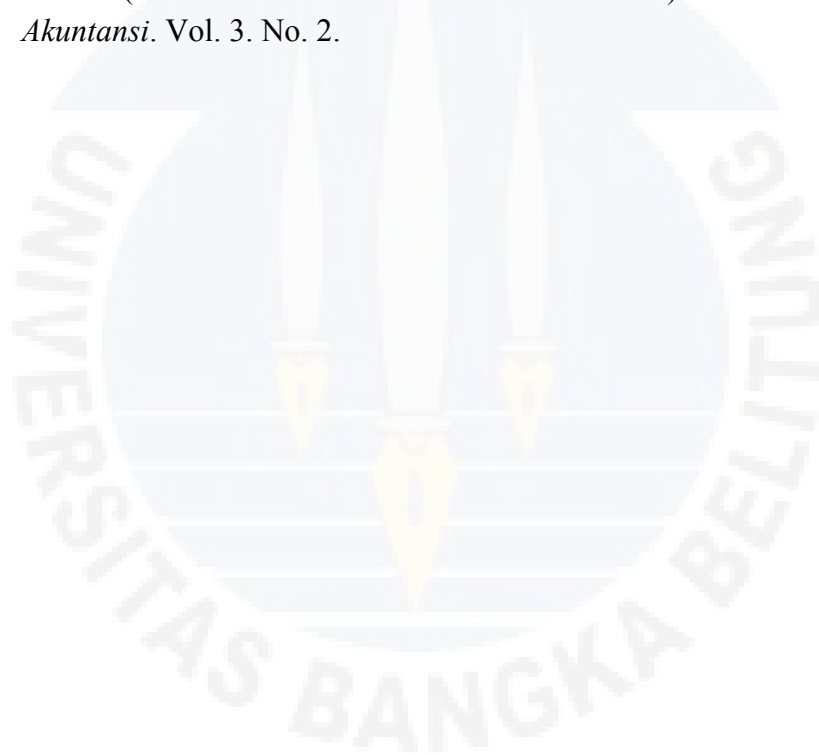
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 2015. *Pedoman pengelolaan keuangan desa*. Palembang: BPKP.
- Eppler, M.J (2006). *Managing Information Quality: Increasing the Value of Information in Knowledge-Intesife Products and Procees*. Germany: Springer Berline- Hadiberg
- Gelinas, Dull, dan Wheeler. 2012. *Accounting Information System- Fondation in Enterprise Risk Management*. Edisi Kesembilan. Kanada: South-Western.
- Halim, A., dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan*
- Hoesada, J. 2014. *Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP)*. Jakarta
- Kasim, Erlynda Y. (2015) Effect of Government Accountants Competency and Implementation of Internal Control to the Quality of Government Financial Reporting. *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 8. No.1
- Lin, C. and Huang, C. (2011). Measuring Competitive Advantage with an Asset-Light Valuation Model. *African Journal of Business Management*, 5(13), 5100-5108.
- Marshall, Patricia, 2003. Mengapa Beberapa Orang Lebih Sukses Dari Yang Lainnya?. *Manusia dan Kompetensi Panduan Praktis Untuk Keunggulan Bersaing*. Editor Boulter, Murray Dalziel, dan Jackie Hill. Alih Bahasa. Bern. Hidayat. Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer. Hal.36-51.
- Nuryanto, Muhamad dan Nunuy Nur Afiah. (2013). The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province - Indonesia). *World Review of Business Research*. Vol. 3. No. 4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan keuangan desa*.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar akuntansi pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar akuntansi pemerintahan*.
- Rampersad, Hubert K. 2005. *Total Performance Scorecard Konsep Manajemen Baru : Mencapai Kinerja dengan Intergritas*. Edisi bahasa Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sofyan, S. H. 2008. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : ALFABETA, CV
- Suwanda, Dadang. (2015). Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol.6. No.4.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan daerah*.
- Utomo, T. W., dan A. Wahyudi., 2008. Penataan kewenangan (urusan) pemerintah desa dan pengembangan standar pelayanan minimal (SPM). *Jurnal Borneo Administrasi* Vol. 4 No.2.
- Wati, Kadek Desiana. Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. Vol. 2. No. 1.

Watson, S.A. 2003. Description, development, structure, and composition of the Corn kernel. Di dalam: White PJ., Johnson LA., editor. *Corn: Chemistry and Technology*. 2an Ed. Minnesota: American Association Of Cereal Chemists Inc. St. Paul, Minnesota, USA. 69-101

Yuliani, Safrida. Nadirsyah dan Usman Bakar. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 3. No. 2.



Lampiran

Wawancara :

Daftar pertanyaan wawancara.

1. Apakah laporan keuangan dibuat tiap periode?
2. Apakah bendahara desa mengerti tentang tujuan pembuatan laporan keuangan desa?
3. Apakah isi laporan keuangan sudah relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakaian dalam proses pengambilan keputusan?
4. Apakah tiap informasi keuangan desa dapat disampaikan dalam laporan keuangan desa?
5. Bagaimanakah jaringan komputer sudah baik digunakan sehingga tidak menghambat pembuatan laporan keuangan?
6. Apakah bagian keuangan telah memiliki komputer dengan jumlah yang cukup?
7. Apakah pengolahan data transaksi keuangan menggunakan softwer yg sesuai dengan peraturan Undang-Undang?
8. Apakah pegawai bendahara harus memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi?
9. Apakah Bendahara sudah mengikuti diklat atau pelatihan?
10. Apakah bendahara memiliki pengetahuan yang cukup tentang akuntansi dan keuangan?

11. Apakah bendahara sudah melakukan atau menyelesaikan laporan keuangan secara tepat waktu?
12. Kendala apa saja yang menjadi penghambat untuk pembuatan laporan keuangan?

